



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WASIS**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **255109**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/21 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 179 m2 di GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/48 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 100.8 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/21 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **385.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 25.300.000 |
| D. SURAT BERTHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 45.500.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 2.205.800.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 571.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 1.634.800.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.